



Original Article

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: *Research Gap Analysis-Bibliometric Vosviewer*

Holdeson^{1✉}, Budi Kristanto²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat

Correspondence Author: jurnalulm@gmail.com[✉]

Abstract:

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan publikasi penelitian mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (MK-PUU) dalam 10 tahun terakhir (2013-2023). Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik deskriptif. Analisis bibliometrik deskriptif dengan data dari Google Scholar (100 jurnal) menunjukkan bahwa publikasi MK-PUU mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 (18%), sedangkan terendah pada tahun 2023 (3%). Pemetaan menunjukkan korelasi antar peneliti dan keterkaitan konsep keilmuan MK-PUU. Terdapat 3 kluster yang dominan: (1) Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, (2) Sengketa kewenangan lembaga negara, dan (3) Penguatan MK dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun penelitian MK-PUU menunjukkan peningkatan, namun penelitian di bidang ini masih perlu didorong. Tiga kluster dominan yang teridentifikasi dapat menjadi peluang bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara dan Mahkamah Konstitusi.

Keywords: analisis bibliometrik; vosviewer; mahkamah konstitusi

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin prinsip-prinsip dan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi dalam penyelenggaraan negara (Siahaan, 2019; Thalib, 2018). Dalam konteks ini, MK dianggap sebagai pengawal konstitusi yang bertugas menegakkan keadilan konstitusional, mendorong agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan secara konsisten, serta berperan sebagai penafsir agar



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

semangat konstitusi senantiasa hidup dalam keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat ([Sihotang, 2015](#)). Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menurut Jimly (2015) Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Meskipun memiliki kewenangan yang sangat penting, terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi. Maruarar ([2011](#)) dan [Habibi \(2014\)](#) menggarisbawahi pentingnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, namun dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam konstitusi yang membutuhkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir untuk menjaga agar ruh konstitusi tetap hidup dan berpengaruh dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam upaya mengatasi kesenjangan tersebut, analisis bibliometrik dapat menjadi solusi yang tepat. Analisis ini dapat meliputi pemetaan publikasi penelitian dari tahun 2013 hingga 2023, identifikasi arah perkembangan konsep keilmuan, dan pemetaan jaringan pengetahuan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Menurut [Rohimah dkk. \(2023\)](#), sebagai penerapan bibliometrik pada literatur ilmiah, dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan penelitian terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang.

Bibliometrika berasal dari bahasa Yunani, kombinasi dari kata "biblion" (buku) dan "metron" (pengukuran). Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Pritchard (1969) dan didefinisikan sebagai penerapan metode matematika dan statistik pada buku atau media komunikasi ilmiah lainnya. Menurut [Elisa \(2021\)](#), bibliometrika adalah penerapan metode matematika dan statistik pada buku atau media komunikasi ilmiah lainnya. [Roemer & Borchardt \(2015\)](#) mendefinisikan bibliometrika sebagai seperangkat metode kuantitatif yang digunakan untuk mengukur, melacak, dan menganalisis literatur ilmiah berbasis cetak. Menurut [Wijaya \(2018\)](#) analisis bibliometrik digunakan berdasarkan topik, bidang, dan masalah penelitian tertentu dengan komponen bibliometrik meliputi pengarang, tahun terbit, jurnal, judul, kata kunci, abstrak, sitasi, h-indeks, co-sitasi, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut [Lukman \(2019\)](#), tujuan bibliometrika adalah menjelaskan proses komunikasi tertulis dan sifat serta arah perkembangannya secara deskriptif, menghitung, dan menganalisis berbagai segi komunikasi. Sederhananya, bibliometrika menjelaskan proses komunikasi tertulis dan perkembangannya dalam suatu disiplin ilmu.

Melalui analisis bibliometrik, tren penelitian terkini dapat dilihat, mengetahui konsep-konsep yang sedang populer di bidang ini, dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang perlu ditutup ([Rakhmani & Siregar, 2016](#); [Hadi dkk., 2024](#)). Analisis ini juga dapat membantu para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum untuk memahami lebih jauh mengenai perkembangan penelitian terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, serta memberikan wawasan yang lebih luas mengenai topik ini untuk penelitian di masa mendatang. Dengan demikian, analisis bibliometrik dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas penelitian terkait kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa MK memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi, namun terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya; pentingnya bibliometrik untuk memberikan gambaran perkembangan penelitian, arah perkembangan konsep, dan jaringan pengetahuan terkait kewenangan MK; dan pentingnya meningkatkan pemahaman dan kualitas penelitian terkait kewenangan MK dalam pengujian undang-undang sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan dan menganalisis perkembangan penelitian terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang melalui analisis bibliometrik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis bibliometrik deskriptif untuk memetakan dan menganalisis perkembangan penelitian terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang di Indonesia. Subjek penelitian ini adalah publikasi ilmiah yang membahas topik tersebut dari tahun 2013 hingga 2023. Jumlah dokumen dibatasi hingga 100 dokumen untuk mempersempit fokus penelitian dan memudahkan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian publikasi di Google Scholar dengan bantuan aplikasi Publish or Perish. Data yang diperoleh disimpan dalam format file RIS (*Research Information Systems Citation File*) dan kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak Vosviewer.

Analisis bibliometrik digunakan untuk memvisualisasikan pola jaringan antar bibliometrik, jejak historis penelitian, dan kepadatan penelitian di bidang ini ([Zakiyyah dkk., 2022](#); [Mutawally dkk., 2023](#); [Rahayu dkk., 2023](#)). Visualisasi jaringan digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antar istilah penelitian ([Ayu, 2020](#); [Farida, 2020](#); [Utami & Karlina, 2022](#)). Visualisasi overlay membantu memvisualisasikan jejak historis penelitian berdasarkan tahun publikasi. Visualisasi densitas menampilkan kepadatan atau penekanan pada kelompok penelitian tertentu. Selain analisis bibliometrik, penelitian ini juga melakukan analisis konten untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penelitian yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Informasi yang dianalisis meliputi nama peneliti, tahun publikasi, produktivitas peneliti, dan tren penelitian di bidang ini.

Penelitian ini juga menganalisis kolaborasi antar penulis dalam penelitian ini dan hubungan bibliometrik berdasarkan kata kunci (co-occurrence) untuk melihat hubungan antara konsep dan topik penelitian. Dengan menggunakan metode analisis bibliometrik deskriptif yang komprehensif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai perkembangan penelitian terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang di Indonesia.

Hasil

Perkembangan Publikasi Penelitian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang

Hasil dokumen penelitian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang pada jurnal terindeks Google scholar melalui Publish or Perish diperoleh 100 dokumen. Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan disiplin

ilmu, dilakukan filter atau penyaringan ([Fitriani dkk., 2021](#); [Zakiyyah dkk., 2022](#); [Ningsih & Fajri, 2023](#)) untuk mengerucut pada disiplin ilmu Kewenangan MK Dalam Pengujian UU.

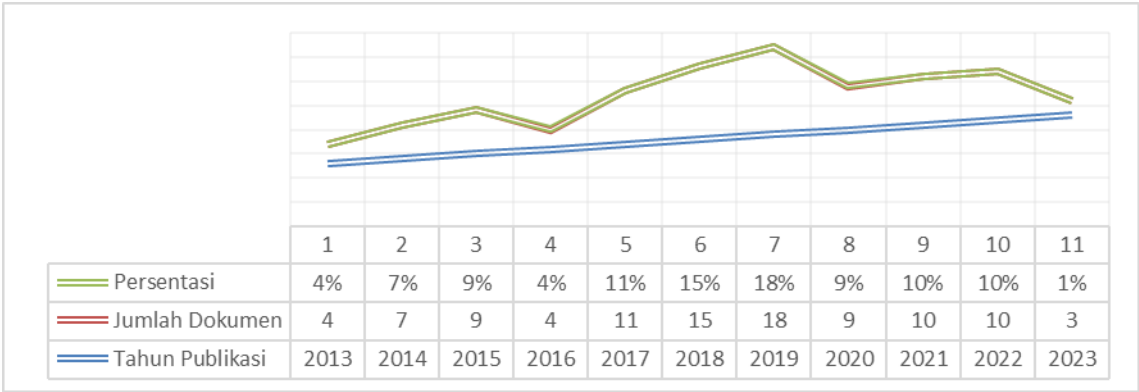
Perkembangan pertumbuhan publikasi dengan topik Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang dalam rentang tahun 2013 – 2023 yang diambil dari database Google scholar melalui software Publish or Perish menunjukkan perkembangan yang fluktuatif (lihat Tabel 1). Dari total publikasi yang terindeks Google scholar yakni 100 dokumen. Perkembangan pertumbuhan publikasi mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang yang tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni mencapai 18 Dokumen (18%). Sedangkan publikasi terendah terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah publikasi sebanyak 3 (3%).

Tabel 1. Perkembangan publikasi bidang Kewenangan MK dalam Pengujian UU

Tahun Publikasi	Jumlah Dokumen	Persentasi
2013	4	4%
2014	7	7%
2015	9	9%
2016	4	4%
2017	11	11%
2018	15	15%
2019	18	18%
2020	9	9%
2021	10	10%
2022	10	10%
2023	3	1%
Total Publikasi	100	
Tahun Publikasi	Jumlah Dokumen	Persentasi

Pada tahun 2020, penelitian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undan-Undang mengalami penurunan jumlah dokumen, yakni hanya sebanyak 4 dokumen (4%) tahun 2016 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penurunan juga terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah dokumen yang terbit hanya sebanyak 3 (3%).

Meskipun mengalami penurunan dalam beberapa tahun, perkembangan penelitian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang secara kuantitas membuktikan bahwa penelitian topik permasalahan yang diminati dan terus berkembang dari tahun ke tahun di Indonesia. Selengkapnnya pertumbuhan publikasi mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang yang terindeks Google scholar dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik perkembangan publikasi penelitian Kewenangan MK dalam Pengujian UU, terindeks Google Scholar

Setelah dataset disimpan dalam tipe RIS (Research Information Systems) menggunakan metadata Publish or Perish, selanjutnya dataset dianalisis menggunakan aplikasi Vosviewer dengan memilih opsi “data create a map based on bibliographic data”. Metode yang digunakan untuk menghitung dataset adalah full counting dengan tujuan perhitungan dilakukan apa adanya sesuai peneliti yang pernah mengambil topik Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang pada penelitiannya. Berdasarkan Gambar 2, angka minimal dokumen pada setiap author diatur sebanyak 1 dokumen, dan pemetaan yang divisualisasikan hanya peneliti yang memiliki hubungan dengan peneliti lain.

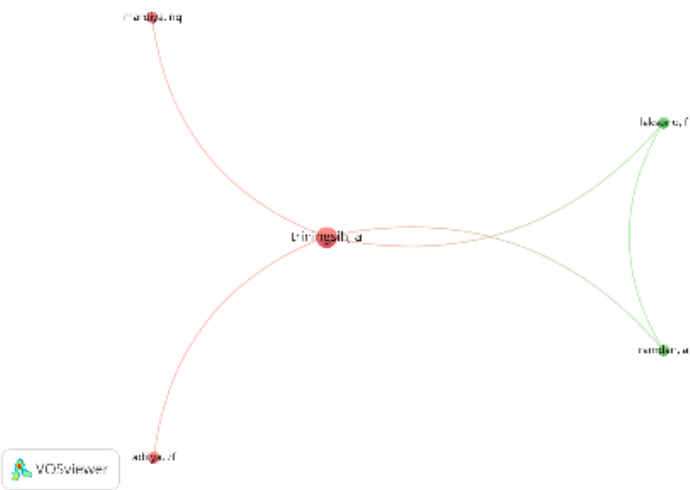
Create Map

Verify selected authors

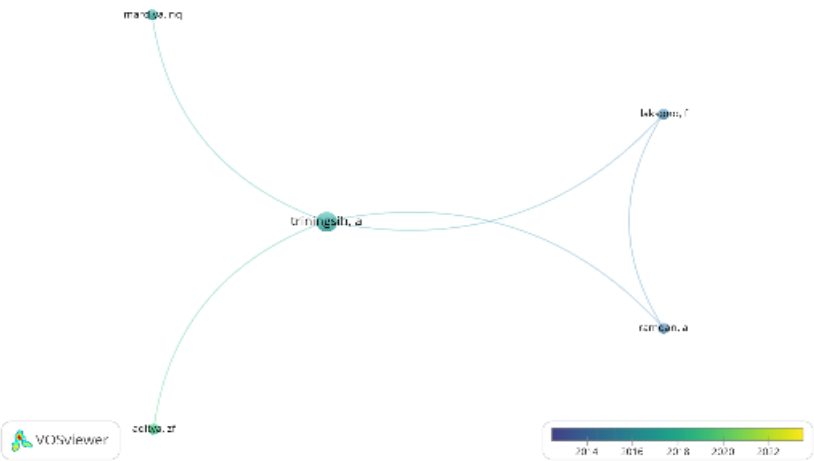
Selected	Author	Documents	Total link strength
☒	triningsih, a	3	4
☒	ebdussamad, z	1	2
☒	elfaris, m	1	2
☒	ali, mm	2	2
☒	andriyan, y	1	2
☒	anindyajati, t	1	2
☒	anira, a	1	2
☒	asy'ari, s	1	2
☒	hadju, zaa	1	2
☒	hilipito, mr	1	2
☒	iftitah, a	1	2
☒	izzaty, r	1	2
☒	leksono, f	1	2
☒	muhamad, s	1	2
☒	muhtar, mh	1	2
☒	nugraha, x	1	2
☒	onita, sad	1	2
☒	perdana, mt	1	2
☒	rachman, in	1	2
☒	rahman, f	2	2

< Back Next > Finish Cancel

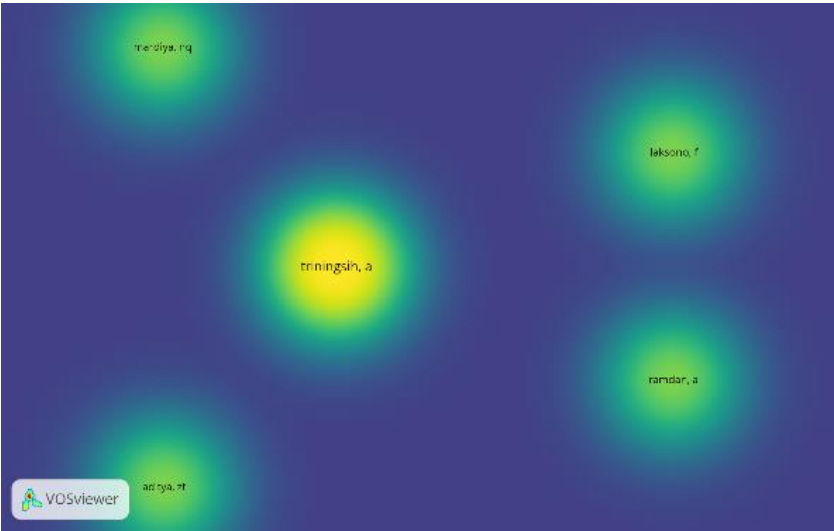
Gambar 2. Daftar penulis Kewenangan MK dalam Pengujian UU pada Vosviewer



Gambar 3. Visualisasi network pada co authorship



Gambar 4. Visualisasi Overlay pada co-authorship



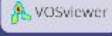
Gambar 5. Visualisasi density pada co-authorship



Gambar 6. Visualisasi network pada co-occurrence



Gambar 7. Visualisasi Overlay pada co-occurrence



Gambar 8. Visualisasi density pada co-occurrence

Gambar 3 menunjukkan network visualization pada co-authorship yang ditandai dengan adanya node (bulatan) yang merepresentasikan penulis atau peneliti, dan edge (jaringan) merepresentasikan hubungan antar penulis atau peneliti. Sekumpulan node yang dilengkapi edge tersebut menjelaskan bahwa adanya korelasi atau hubungan antar peneliti dalam penelitian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. Analisis bibliometrik berdasarkan peneliti atau penulis (author) berpusat pada Triningsih. Jaringan menunjukkan adanya hubungan atau kolaborasi penulis, seperti jaringan (edge) yang menghubungkan penulis Triningsih dengan penulis lain dan saling berkaitan.

Gambar 4 menunjukkan Overlay visualization yang memetakan jejak historis author dalam penelitian di Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang, pemetaan ini ditandai dengan adanya mode yang memiliki warna serta edge yang menghubungkan satu peneliti dengan peneliti lain. Warna gelap pada node menunjukkan penelitian yang telah dilakukan di waktu yang lampau dari kurun waktu yang telah ditentukan. Misalnya pada gambar, warna node Tosca melambangkan tahun 2018. Pada analisis ini dapat ditarik penjelasan meliputi penelitian yang dilakukan Triningsih dikutip oleh Ardiya dalam penelitiannya sama-sama saling berhubungan satu dengan yang lainnya; penelitian yang dilakukan Triningsih dikutip oleh Aditya dalam penelitiannya sama-sama saling berhubungan satu dengan yang lainnya; dan penelitian yang dilakukan Triningsih dikutip oleh Laksono dalam penelitiannya sama-sama saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Dari hasil density visualization yang ditunjukkan pada Gambar 5 dapat diidentifikasi adanya kerapatan atau penekanan pada node yang memiliki arti bahwa kelompok peneliti yang meneliti Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang memiliki hubungan satu sama lain. Selain itu, tingkat kejenuhan node pada density visualization diindikasikan dari banyaknya penelitian yang melibatkan penelitian lain dengan cara mengutip penulis.

Setelah dataset disimpan dalam tipe RIS (Riset Information Systems) menggunakan metadata Publish or Perish, selanjutnya dataset dianalisis menggunakan aplikasi Vosviewer dengan memilih opsi data “create a map based on text data”, dengan tujuan untuk membuat jaringan atau hubungan term (istilah) berdasarkan data teks. Bidang dari term (istilah) atau istilah diekstrak berdasarkan judul dan abstrak sedangkan metode yang digunakan untuk menghitung dataset adalah full counting dengan tujuan perhitungan dilakukan apa adanya sesuai penelitian yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang yang pernah dilakukan. Jumlah minimal kemunculan pada suatu istilah adalah sebanyak 2 dokumen, sehingga menghasilkan 56 dokumen yang memiliki hubungan occurrence.

Analisis bibliometrik dilakukan dengan membuat visualisasi dalam bentuk network, Overlay, dan density yang bertujuan untuk mengetahui jaringan bibliometrik diantara artikel- artikel atau publikasi online dari metadata yang telah diunduh. Jaringan bibliometrik terdiri atas node berupa bulatan atau lingkaran yang merepresentasikan kata kunci, sedangkan edge atau simpulan jaringan merepresentasikan hubungan antara pasangan node. Pemetaan serta Pengklasteran pada analisis bibliometrik melalui software Vosviewer bersifat komplementer yang artinya saling melengkapi satu sama lain. Pemetaan ini dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran secara detail dari struktur sebuah jaringan bibliometrik

(Waltman dkk., 2010; Van Eck dkk., 2010; Effendi dkk., 2021). Selain itu pengklasteran digunakan untuk menunjukkan gambaran atau insight mengenai pengelompokan bibliometrik.

Gambar 6 menunjukkan network visualization pada co-occurrence yang menjelaskan jaringan atau hubungan dari term satu dengan term lainnya pada penelitian di Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang dalam kurun waktu 2013 – 2023. Dari 100 artikel yang terindeks Google scholar dapat dikelompokkan ke dalam 3 klaster yang dapat diidentifikasi melalui warna node masing-masing kata kunci. Klaster 1 disimbolkan berwarna biru mencakup istilah-istilah yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi yang pernah diteliti yakni konstitusional negara, lembaga negara dan lain-lain. Klaster 2 yang disimbolkan warna Kuning terdiri dari Konstitusi, lembaga negara dan lain-lain. Klaster 3 yang disimbolkan warna ungu terdiri dari istilah seperti Putusan Mahkamah, Konstitusi nomor, dan lain-lain.

Setelah mengidentifikasi pemetaan serta pengklasteran Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang menggunakan network visualization, selanjutnya adalah melakukan pemetaan dan pengklasteran tren penelitian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang berdasarkan jejak historis atau tahun terbit penelitian. Informasi yang didapatkan dari hasil Overlay visualization pada Gambar 8. dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi serta mendeteksi state of the art dari penelitian di Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang yang dilakukan dalam kurun waktu 2013 – 2023.

Dari hasil analisis bibliometrik melalui metadata Publish or Perish yang diimpor ke dalam software Vosviewer, menghasilkan visualisasi Overlay. Pada visualisasi ini, warna pada node merepresentasikan kata kunci yang mengindikasikan tahun terbit. Misalnya kata kunci “information system” memiliki node berwarna hijau, yang berarti artikel yang memuat kata kunci tersebut dipublikasikan pada tahun 2013 – 2023. Contoh lainnya adalah istilah “Indonesia” yang pada visualisasi Overlay digambarkan memiliki node berwarna Tosca, hal ini memiliki makna bahwa istilah “Mahkamah Konstitusi”. Contoh lain lagi adalah kata kunci “Hukum” yang memiliki warna node ungu gelap.

Selanjutnya adalah analisis bibliometrik menggunakan density visualization atau visualisasi kerapatan. Dari hasil visualisasi yang ditunjukkan pada Gambar 9 dapat diidentifikasi bahwa terdapat wilayah-wilayah padat atau yang memiliki kerapatan tinggi pada node satu dengan node lainnya. Tingkat kejenuhan yang diidentifikasi pada banyaknya kata kunci ditandai dengan warna kuning memiliki arti bahwa wilayah tersebut merupakan topik yang telah banyak diteliti dan terindeks Google scholar, misalnya adalah kata kunci Mahkamah Konstitusi, Hukum, putusan mahkamah konstutusi dan Undang-Undang. Sedangkan node yang ditandai dengan warna gelap mengindikasikan bahwa topik-topik tersebut masih belum banyak diteliti. Hal tersebut dapat menumbuhkan peluang untuk melakukan riset atau penelitian dengan topik-topik tersebut, misalnya adalah kata kunci pengujian undang-undang yang terhubung dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. Dengan analisis bibliometrik pada visualisasi density yang menunjukkan adanya regangan serta intensitas yang rendah. menunjukkan bahwa penelitian mengenai yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam Pengujian Undang-Undang masih relatif rendah, hal tersebut membuat riset dengan topik tersebut masih sangat luas untuk diteliti.

Kesimpulan

Penelitian mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang telah berfluktuasi antara tahun 2013-2023, dengan tahun 2019 sebagai puncaknya (18%) dan tahun 2023 sebagai titik terendah (3%). Arah penelitian sejalan dengan temuan-temuan baru dan menunjukkan tren yang positif. Para peneliti saling mengutip satu sama lain, seperti Triningsih, Mardiya, Laksono, Aditya, dan Ramdan. Meskipun masih minim, bidang ini memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan, dengan 3 klaster yang dominan: Mahkamah Konstitusi, Hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

- Ayu, F. A. P. (2020). *Analisis Bibliometrik Publikasi Ilmiah Bidang Studi Penyakit Hepatitis di Indonesia Periode 2009-2019* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Effendi, D. N., Anggraini, W., Jatmiko, A., Rahmayanti, H., Ichsan, I. Z., & Rahman, M. M. (2021, February). Bibliometric analysis of scientific literacy using VOS viewer: Analysis of science education. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1796, No. 1, p. 012096). IOP Publishing.
- Elisa, L. (2021). Pengaruh Bibliometrik Terhadap Perkembangan Sains dan Teknologi. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 23(2), 251-266.
- Farida, N. (2020). Analisis bibliometrik berdasarkan pendekatan Co-word: Kecenderungan penelitian bidang kearsipan pada Jurnal Khazanah dan Journal of Archive and Record tahun 2016–2019. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 13(2), 91-109.
- Fitriani, K., Isbandi, I., & Amaliyah, A. (2021). Perancangan Sistem Manajemen Dokumen Dengan Menggunakan Metode Text Mining Di Kantor Kelurahan Sekejati. *Telematika*, 3(1), 45-59.
- Habibi, N. (2014). *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hadi, A., Widiyasono, N., Slamet, I., Permana, A. A. J., Pasrun, Y. P., Adawiyah, R., & Abdurrohman, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Ilmu Komputer: Dilengkapi dengan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie (2015). *Mahkamah Konstitusi dan Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia*. Pustaka LP3ES.
- Lukman, H., Sulisty, B., & Rohman, F. (2019). Analisis Bibliometrik Jurnal Pendidikan Islam di Indonesia Tahun 2009-2018. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 8(1), 1-18.

- Mutawally, A. F., Santosa, A. B., & Mulyadi, D. (2023). Analisis Bibliometrik Penelitian Sanitasi Pesantren (2013-2023). *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(3), 1077-1086.
- Ningsih, J., & Fajri, H. (2023). Trend Riset Kapasitas Non State Actor Dalam Pelestarian Hutan Mangrove. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2584-2593.
- Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. *Journal of documentation*, 25, 348.
- Rahayu, S., Rukli, R., & Quraisy, A. (2023). Analisis bibliometrik terhadap face and voice recognition. *Khazanah Pendidikan*, 17(2), 188-196.
- Rakhmani, I., & Siregar, F. (2016). *Mereformasi Penelitian di Indonesia: Kebijakan dan Praktik*. Working Paper 92. Global Development Network Serial Working Paper. Indonesia.
- Roemer, R. C., & Borchardt, R. (2015). Meaningful metrics: A 21st-century librarian's guide to bibliometrics, altmetrics, and research impact. Libraries Unlimited.
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)*, 5(1), 30-40.
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357-378.
- Sihotang, J. (2015). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Penguji Undang-Undang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Dialogia Iuridica*, 7(1), 37-46.
- Thalib, A. R., (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Utami, S. B., & Karlina, N. (2022). Analisis Bibliometrik: Perkembangan penelitian dan publikasi mengenai koordinasi program menggunakan VOSviewer. *Jurnal Pustaka Budaya*, 9(1), 1-8.
- Van Eck, N. J., Waltman, L., Dekker, R., & Van Den Berg, J. (2010). A comparison of two techniques for bibliometric mapping: Multidimensional scaling and VOS. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 61(12), 2405-2416.
- Waltman, L., Van Eck, N. J., & Noyons, E. C. (2010). A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks. *Journal of informetrics*, 4(4), 629-635.
- Wijaya, A. (2018). Bibliometrik: Sebuah Pengantar. *Jurnal Ilmiah Bibliometrik*, 1(1), 1-10.
- Zakiyyah, F. N., Winoto, Y., & Rohanda, R. (2022). Pemetaan bibliometrik terhadap perkembangan penelitian arsitektur informasi pada Google Scholar menggunakan VOSviewer. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 2(1), 43-60.
- Zakiyyah, F. N., Winoto, Y., & Rohanda, R. (2022). Pemetaan bibliometrik terhadap perkembangan penelitian arsitektur informasi pada Google Scholar menggunakan VOSviewer. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 2(1), 43-60.